

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adji, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Cetakan ke-1, Erlangga, Jakarta.

Anwar C, 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*, Intrans Publishing, Malang.

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

_____, 2008, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

_____, 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2005, *Proses Pembahasan RUU tentang Komisi Yudisial*, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta.

Fajar, Mukti, Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadjon, Philipus M., 1989, *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Ind. Hill Co, Jakarta.

Handoko, Duwi, 2015, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Hawa dan Ahwa, Pekanbaru.

Holten, N Gery, Lawson L Lamar, 1964, *The Criminal Courts: Struktureel, Personnel, and Prosesses*, Mc Graw Inc, New York.

Komisi Hukum Nasional, 2003, *Laporan Akhir "Rekrutmen dan Karir di Bidang Peradilan"*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta.

Komisi Yudisial RI, 2013, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia (Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang)*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Jakarta.

- _____, 2015, *Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim versi Komisi Yudisial Republik Indonesia*, Komisi Yudisial RI, Jakarta.
- LeIP, 2003, *Draft I Policy Paper dan Rancangan Undang-Undang tentang Komisi Yudisial*, LeIP, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh., 2009, *Konstruksi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM UNISBA, Bandung.
- _____, Kuantu Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mujahidin, Ahmad, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Salam, Moch. Faisal, 2003, *Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia (Memuat UU No. 43 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Imam Anshori, 2014, *Konsep Pengawasan Kehakiman 'Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan'*, Setara Press, Malang.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soemantri, Sri, 1987, *Persepsi terhadap Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD 1945*, Alumni, Bandung.
- _____, 1992, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.

Sumitro, Ronny Hanityo, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Supreme Court of Indonesia, 2008, *Judicial System of The Supreme Court of The Republic of Indonesia*, Supreme Court of Indonesia, Jakarta.

Suruasumantri, Jujur S., 1996, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*, Gramedia, Jakarta.

Thaib, Dahlan, 2009, *Ketatanegaraan Indonesia: Perspektif Konstitusional*, Total Media, Jakarta.

Thohari, A. Ahsin, 2004, *Komisi Yudisial & Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta.

Tim Peneliti Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim, 2015, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta.

Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan UUD NRI Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Voermans, Wim, 2002, *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa (Council for the Judiciary in EU Countries)*. Diterjemahkan oleh: Adi Nugroho dan M. Zaki Hussein, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan- LeIP, Jakarta.

Wade, E.C.S., G. Gogfrey, 1965, *Constitutional Law; And Outline of The law and Practice of The Citizen and the Including Central and Local Government, the Citizen and the State and Administrative Law*, 7th Edition, Longmans, London

Wahyono, Padmo, 1989, *Pembangunan Hukum Indonesia*, Ind. Hill Co, Jakarta.

B. Makalah/Artikel, Majalah dan Jurnal Hukum

Asshiddiqie, Jimly. "Pokok Pikiran tentang Penyempurnaan Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Indonesia" dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/65/POKOK_PIKIRAN_TENTANG_PENYEMPURNAAN_SISTEM.pdf, diakses pada tanggal 8 Maret 2016.

- Harkrisnowo, Harkristuti, “Sistem Rekrutmen dan Karir Hakim di Jepang”, *Makalah*, Workshop Rekrutmen dan Karir Hakim di Bidang Peradilan, kerjasama Fakultas Hukum UGM dan Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 31 Juli 2002.
- Hermansyah. 2012. “Rekrutmen dan Pembinaan Hakim ala Korsel dan Turki”. *Buletin Media Informasi Hukum dan Peradilan Komisi Yudisial*, Vol. VII, No. 1, Juli-Agustus.
- Litolung, Paulus Efendi, “Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim (Tanggapan Terhadap laporan Sementara Penelitian)”, *Makalah*, Lokakarya Membangun Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 5 Juli 2005.
- Malik, “Telaah Makna Hukum Putusan MK yang Final dan mengikat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009.
- Reksodipuro, Mardjono, “Pendidikan Hakim yang Terpadu Dengan Seleksinya (Suatu Saran Model Integrasi Pendidikan dan Seleksi Pengangkatan Calon Hakim untuk Menghadapi Kritik Tiada Henti terhadap Hakim Indonesia)”, *Makalah*, Seminar Komisi Yudisial tentang Pengangkatan Hakim Terpadu, Jakarta, 15 November 2010.
- Sambuari, Fista Prilia, “Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 1, No. 2, April-Juni 2013.
- Syahuri, Taufiqurrahman, “Sistem Rekrutmen Hakim Berdasarkan Tiga Undang-Undang Bidang Peradilan Tahu 2009 Untuk Mewujudkan Peradilan Bersih”, *Makalah*, Seminar “Pembaharuan Sistem Hakim Sebagai Pondasi Mewujudkan Peradilan Bersih”, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Bandung, 10 Oktober 2013.

C. Internet

- Ali, “Rekrutmen Hakim Tahun ini Tanpa Banyak Libatkan KY”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4cb3852d5254e/rekrutmen-hakim-tahun-ini-positif-tanpa-ky>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016.
- Rositawati, Dian, “Analisis Persoalan Seleksi Hakim dalam Putusan MK: Distribusi atau Sentralisasi?”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt561779b5d4d5a/analisis-persoalan-seleksi-hakim-dalam-putusan-mk--distribusi-atau-sentralisasi-broleh--dian-rositawati->, diakses pada tanggal 12 November 2015.

Yasin, Muhammad, “Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt529ad534522f0/menguji-sifat-final-dan-mengikat-dengan-hukum-progresif>, diakses pada 17 Desember 2015.

Yoz, “RUU Jabatan Hakim Pintu Masuk Selesaikan Problem Hakim”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55064c6199b06/ruu-jabatan-hakim-pintu-masuk-selesaikan-problem-hakim>, diakses pada tanggal 3 Maret 2016.

D. Peraturan Perundang-Undangan/Dokumen Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 2699).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2767).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

The Bangalore Principles of Judicial Conduct, 2002.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tanggal 16 Agustus 2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
tanggal 28 Oktober 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 perihal pengujian
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

